

**CALON TUNGGAL PADA PEMILUKADA KABUPATEN ENREKANG**

**TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik



Oleh :

**ASHARI KARA**

**E 111 15 007**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**



**SKRIPSI**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**CALON TUNGGAL PADA PEMILUKADA KABUPATEN ENREKANG**  
**TAHUN 2018**

Di susun oleh:

Ashari kara

E 111 15 007

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal : 14 Mei 2019

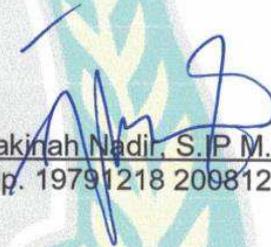
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

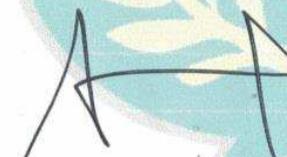
  
Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.  
Nip. 19750818 200801 1008

  
Sakinah Nadi, S.IP M.Si.  
Nip. 19791218 200812 2002

Mengetahui :

Plt Ketua Departemen Ilmu politik  
dan Pemerintahan FISIP Unhas

Ketua program Studi Ilmu  
Politik

  
Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.  
Nip. 19750818 200801 1008

  
Andi Ali Armunanto S.IP M.Si.  
Nip. 19801114 200812 1003



**LEMBAR PENERIMAAN**  
**SKRIPSI**  
**CALON TUNGGAL PADA PEMILUKADA KABUPATEN ENREKANG**  
**TAHUN 2018**

Di susun oleh:

Ashari kara

E 111 15 007

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada  
Program Studi ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosilal Dan Ilmu Politik

Menyetujui  
Panitia Ujian

Ketua	: Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Ariana S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Andi Naharuddin S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Sakinah Nadir S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sakinah Nadir S.IP, M.Si	(.....)



## Abstrak

**Ashari Kara, NIM E 111 15 007, dengan judul “calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018”. Di bawa bimbingan Dr Phil Sukri S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Sakinah Nadir S.IP, M.Si selaku pembimbing II.**

---

Pemilukada tahun 2018 di Kabupaten Enrekang merupakan pemilukada yang ke tiga kalinya yang pernah di lakukan di Kabupaten Enrekang, namun pada pemilukada tahun 2018 berbeda dari pemilukada sebelumnya di mana hanya ada satu calon atau biasa disebut calon tunggal. Pembahasan mengenai calon tunggal selalu menarik sehingga penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *New instituolismme*, tinjauan partai politik dan tinjauan pemilukada langsung di Indonesia. untuk metode dan jenis penelitian menggunakan tipe kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga fenomena calon tunggal dapat terjadi pada Pemilukada kabupaten Enrekang tahun 2018. Dengan jenis penelitian menggunakan studi kasus. Dalam penelitian ini terdapat dua model data yaitu data sekunder dan data primer sedangkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu mereduksi data, data display, kesimpulan/verifikasi.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan membuktikan elit politik dalam memilih calon terkesan pragmatis sehingga dalam proses pengusungan partai tidak memilih calon yang benar-benar terbaik. Rekam jejak Muslimin Bando yang masih baik di mata masyarakat Kabupaten Enrekang dalam segi kepemimpinan. Hal lain yang menjadi sebab sehingga terdinya calon tunggal adalah partai politik cenderung egois dalam hal ini partai politik tidak mementingkan untuk menghadirkan figur lain yang dianggap mampu untuk bersaing dengan Muslimin Bando. partai di rasa bermain aman dengan membuat suatu koalisi besar untuk satu calon. Lemahnya sistem yang mengatur tentang calon tunggal juga merupakan sebab utama dikarenakan adanya celah yang diberikan oleh pemerintah sehingga fenomena calon tunggal diupayakan oleh sekelompok golongan elit sehingga dapat dengan mudah memenangkan pemilukada.



nci: Pemilukada, Partai Politik, Calon tunggal, Aktor

## ABSTRACT

**Ashari Kara, NIM E 111 15 007, by title "Single Candidate In Enrekang Regency post-conflict local election in 2018". Taken under the guidance of Dr. Phil Sukri S.IP, M.Sc. as mentor I and Sakinah Nadir S.IP, M.Sc. as mentor II**

---

Regional elections in 2018 in Enrekang Regency is the 3<sup>rd</sup> (third) time general division of regional heads in Enrekang District, but in 2018 regional head elections different from the previous regional head elections where only one candidate or commonly called a single candidate. The discussion of the single candidate is always interesting so that this paper aims to find out what factors influence so that the occurrence of a single candidate in the Enrekang Regency election in 2018.

This study uses the New Institutionalism approach, a political party review and a direct post-conflict local election review in Indonesia. For the method and type of research using descriptive qualitative type which aims to find out what factors influence so that the phenomenon of a single candidate can occur in the regional head elections of Enrekang district in 2018. With this type of research using case studies. In this study there are two data models, namely secondary data and primary data whereas to analyze the data using this study uses three methods, namely reducing data, display data, conclusions / verification.

In the results of the research conducted, it proved that the political elite in choosing candidates seemed pragmatic, so that in the process of carrying out the party, they did not choose the best candidates. The track record of Muslimin Bando which is still good in the eyes of the Enrekang people concerning leadership. Another thing that is the cause so that the existence of a single candidate is that political parties tend to be selfish in this case the political parties do not give priority to presenting other figures who are considered capable of competing with Muslimin Bando, the party feels safe playing by making a large coalition for one candidate. The weakness of the system governing single candidates is also the main reason because of the gaps provided by the government so that the phenomenon of single candidates is sought by a group of elites they easily win the election.



Keywords: Regional head elections, Political parties, Single candidate,

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil alamin. Segala Puja dan Puji bagi Allah sebanyak tetesan air hujan, sebanyak butiran biji-bijian, sebanyak makhlukNya di langit, dibumi dan diantara keduanya. Segala puja dan puji yang banyak dan tak berkesudahan untuk Allah, meskipun puja segala pemuji selalu kurang dari sewajarnya. Segala puja dan puji untuk Allah seagung pujianNya terhadap diriNya.

Shalawat dan Salam yang tiada pernah terputus dan tiada pernah terhenti terus-menerus, sambung-menyambung sampai akhir zaman untuk Nabi yang dicintai dan dikasihi oleh ruh, jiwa dan jasad kami. Muhammad hamba Allah dan rasulNya, serta para sahabat yang berjihad bersamanya dan setia padanya sepanjang hayatnya.

Skripsi dengan judul “Calon Tunggal Pada Pemilu 2018” merupakan suatu karya yang di harapkan menjadi pengantar untuk lebih memahami mengenai mengapa calon tunggal dapat terjadi khususnya calon tunggal pada pemilu yang ada di negara ini.

Pada kesempatan ini juga penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk dunia akademis pada khususnya dan untuk masyarakat umumnya



Terlepas dari segala hal itu, penulis pada kesempatan ini memohon maaf apabila ada tulisan/karya tulis yang dikutip dari buku tanpa sepengetahuan penulis atau penerjemah/editornya. Namun pada kesempatan ini perkenankan saya menghaturkan banyak terima kasih kepada para penulis terdahulu yang telah memberikan pemahaman dan wacana baru dalam pemikiran penulis. Penulis juga memohon maaf apabila ada penulisan dalam skripsi ini yang dianggap menyinggug dan kurang pantas untuk pembaca.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dalam hal ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Terima kasih kepada ibu Prof. Dwi Aries Tina, MA selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin, M.Si selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga sebagai dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Andi Ali Armunanto S,IP M,Si selaku ketua prodi Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Phil. Sukri S,IP M.Si dan Sakinah Nadir, S.IP M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu

ditengah kesibukannya dan memberi bimbingan kepada penulis.

Terimah kasih atas saran dan masukan yang diberikan untuk penelitian ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.



5. Andi Naharuddin S,IP M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis yang senangtiasa mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
6. Dosen-Dosen dan staff pengajar Depertemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan terkhusus pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Alm. Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Dr. Muhammad Saad, Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Ariana Yunus, S.IP M.SI., Dr. Gustiana S.IP.M.SI., . M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
7. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Pak Mursalim, Ibu Hasna, dan Pak Adit yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak ibu.
8. Seluruh ketua DPD Partai Politik Kabupaten Enrekang yang senangtiasa memberikan informasi kepada peneliti, dan responden-responden lain serta orang-orang yang turut membantu penelitian Ummar SH, Alzam tawakkal, Amiruddin, Asram, Izmi, Angga dan sugesti Baba, serta orang-orang yang tak sempat penulis ucapkan dan membantu dalam penelitian penulis.



9. Saudara-saudara senasib dan seperjuangan, yang kesetiaan pengorbanan dan perjuangannya selalu di hati. Delegasi ilmu politik 2015 Universitas Hasanuddin yang penulis cintai terima kasih atas cinta yang kalian berikan Wahyudin, Syifa, Ayu, Rahmat besar, Asrunil, Liza, Nisa, Galank, Pira, Susi, Astmha, Aswita, fichri, Nita, Poces, Ningrat, Lembang, Upi, Dika, Dery, Evita, Syawal, Ime, Ramma kecil, Syarif, Dianto, Jhony, Vivi, Marwah, Ubay, Tias, Nindy, Adi, Siska, Dilla, Kamal, Ical, Juned, lin, Sibga, Mira, Arigie, Ifan.
10. Saudara-saudara KEMANG Adi burhan, Kamal Pare, Ramma Rohyat, Ifan Cambang yang selama ini tak henti-hentinya memberikan edukasi positif dan negatif kepada penulis dan penulis bangga kepada kalian.
11. Teman-teman HMI di komisariat isipol unhas, baik di seluruh cabang Makassar Timur, Cabang Enrekang dan Cabang Makassar, serta cabang lain yang sempat berkenalan dengan penulis yang diskusinya memunculkan ide-ide baru dan membantu penulis dalam menyelesaikan hasil peelitiannya. Semoga HMI selalu jaya dan menjadi Harapan Masyarakat Indonesia.
12. Sahabat spesial yang dengan tabahnya menemani penulis dalam melakukan penyusunan penelitian Ayu Silvia.



13. Untuk keluarga yang tak lelahnya memberi semangat dalam penelitian penulis, untuk keluarga alm Hamansa dan nyonya (tante anti, hajid, kory) Pua Pajjo dan keluarga (Marlina, haslindah, Novarianti, Erviani, fadli, ria, kia, qaila)
14. Nasrullah A, S.Pd M.Pd & Fatimah Jamaluddin SE M.Si yang setia memberikan penulis masukan dan saran dalam penulisan dan penelitian penulis.
15. Untuk Om tika dan tante Neneng serta dadang dan shafira terima kasih untuk selama ini kalian telah menjadi keluarga ke dua untuk penulis.
16. Untuk yang terakhir dan spesial Kedua orang tuaku Ali Kara dan darmawati terima kasih untuk apa yang kalian berikan selama ini hingga penulis sampai ke titik ini dan tak lupa pula untuk adik-adik ku yang saya cintai Rani dan Ana tetaplah menjadi 2 wanita kebanggaan keluarga.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan di sini. Dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasi yang tak terhingga. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik sangat penyusun harapkan. Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis. Sekecil apapun perkenalan yang

an tersebut. Sungguh suatu hal yang amat luar biasa bagi penulis segalanya, Kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan



mereka dalam kehidupan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermamfat bagi jurusan ilmu politik dan almamater Universitas Hasanuddin serta masyarakat Indonesia pada umumnya, Amin Ya Rabb Al-Alamin.

Makassar April 4, 2019

Ashari Kara  
NIM E 111 15 007



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
ABSTRACT.....	iv
Kata Pengantar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Manfaat akademis.....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
<b>E. Telaah pustaka .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. <i>New instituolisme</i> (institutiolisme baru) .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Tinjauan pemelukada langsung di Indonesia.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Tinjauan Partai Politik .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Kerangka pikir .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Skema penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Tipe dan Jenis Penelitian.....</b>	<b>37</b>
1. Tipe Penelitian .....	37
2. Jenis penelitian.....	38
<b>B. Lokasi penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>C. Teknik pengumpulan data .....</b>	<b>39</b>
1. Data primer .....	39
2. Data sekunder .....	40
<b>D. Informan penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>E. Teknik analisis data.....</b>	<b>42</b>
a. Reduksi Data .....	42
Data <i>Display</i> .....	43
Kesimpulan/Verifikasi .....	44
<b>SAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
Sejarah Kabupaten Enrekang.....	45



B.	Letak dan kondisi Geografis Kabupaten Enrekang.....	48
C.	Sejarah Pemerintahan Kabupaten Enrekang .....	49
D.	Sistem Sosial Kabupaten Enrekang .....	51
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A.	Pengaruh Elit Partai Politik Dalam Pemilukada .....	54
B.	Elektabilitas, Performa, Kekuatan Dan Pengalaman Aktor Dalam Pemilukada .....	66
C.	Partai Politik Dalam Pemilukada.....	70
D.	Calon Tunggal Dalam Pemilukada.....	79
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>86</b>
<b>Lampiran</b> .....		<b>90</b>



## Daftar Tabel

Table 1 Daftar Calon Tunggal Tahun 2015 .....	4
Table 2 Daftar Calon Tunggal Tahun 2017 .....	7
Table 3 Daftar Calon Tunggal Tahun 2018 .....	8
Table 4 Daftar Informan Penelitian .....	41
Table 5 Daftar Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang .....	50

## Daftar Gambar

Gambar 1 Skema penelitian .....	36
Gambar 2 Analisis Data .....	42
Gambar 3 Reduksi Data.....	43
Gambar 4 Peta Letak Geografis Kabupaten Enrekang.....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik<sup>1</sup> dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Istilah demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan/berkuasa, demokrasi berarti rakyat yang berkuasa<sup>2</sup>. Sedangkan pengertian demokrasi menurut Giovanni Sartori sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun yang dapat memilih dirinya sendiri tidak seorang pun dapat mengidentifikasi dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat<sup>3</sup>.

Suatu negara dikatakan demokratis apabila mempunyai sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat. Menurut R. William Liddle yang menyatakan bahwa dalam system pemerintahan demokratis, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik<sup>4</sup>. Setiap warga Negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut



---

gus, 2002. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 154  
n, 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 31  
n Demokrasi Menurut Para Ahli. Rudi Salam, 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta:  
. Hal. 31  
Mutiara Hanun, Perkembangan Demokrasi Indonesia Berdasarkan Sejarah  
han Politik Orde Baru, Universitas Indoneisa

Undang-Undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum<sup>5</sup>.

Pasca reformasi 1998 semangat berbangsa dan bernegara berubah menjadi desentralistik atau pemerataan kekuasaan di daerah-daerah yang tidak berpusat lagi di Jakarta. Terbit UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada 7 Mei 1999, (pasal 18 ayat 1)<sup>6</sup>, yang segera mengubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di masa ini, kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD, tak lagi ada campur tangan pemerintah pusat, berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu kepala daerah diangkat oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD.

Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak di pilih lagi oleh DPRD melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni Tahun 2005. Pada tahun 2007 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,



---

rianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah, 2006. Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem  
pai Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa. Hal. 298  
nelalui [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_22.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf) pada November  
ukul 16:17 Wita

sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menyelenggarakan pemilukada setelah pilkada masuk ke dalam rezim pemilu pada tahun 2007. Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bersaing kala itu. Adang Daradjatun berpasangan dengan Dani Anwar dan Fauzi Bowo berpasangan dengan Prijanto<sup>7</sup>. Setelah pemilukada DKI Jakarta di susul oleh pemilukada Kota Cirebon pada tanggal 24 Febbuari 2008 dan provinsi Jawa Barat pada 13 April 2008<sup>8</sup>. Pada tahun 2015 setelah berlakunya Undang-Undang no 8 tahun 2015 pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2014<sup>9</sup> yaitu pelaksanaan pemilukada yang di lakukan secara serentak pada bulan desember tahun 2015 itu diikutii oleh 8 provinsi, 170 Kabupaten dan 26 kota dalam hal ini pemilukada serentak ini menjadi pemilukada pertama yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Dalam pemilukada ini timbul polemik baru yaitu terdapat tiga daerah yang hanya memiliki satu pasang calon yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasik Malaya dan Kabupaten Timur tengah (NTT).

---

<sup>7</sup> Di akses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Gubernur\\_DKI\\_Jakarta\\_2007](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2007) al 31 oktober 2018 pada pukul 11;20 wita

[wikipedia.org/wiki/Daftar\\_pemilihan\\_umum\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia\\_2008](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_umum_kepala_daerah_di_Indonesia_2008) oktober 2018 pada pukul 11;36 wita  
s melalui <http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/1627.pdf> pada tanggal 04 2018 pukul 23;16 wita



Table 1 Daftar Calon Tunggal Tahun 2015

NO	TAHUN	NAMA DAERAH/NAMA PASANG CALON DAN PARTAI PENGUSUNG
1	2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Blitar (Jawa Timur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rijanto dan Marhenis Urip Widodo</li> <li>• Diusung oleh PDIP</li> </ul> </li> <li>2. Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto</li> <li>• Diusung oleh PDIP, PAN, dan PKS</li> </ul> </li> <li>3. Kabupaten Timur Tengah (NTT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes</li> <li>• Diusung oleh PDIP</li> </ul> </li> </ol>

Permasalahan pemilukada Kabupaten Blitar yang sempat tertunda sekitar satu setengah bulan, karena hanya mempunyai satu pasangan calon yaitu Rijanto dan Marhenis Urip Widodo calon ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).<sup>10</sup> Sebelumnya, pasangan calon tersebut diusung oleh dua partai politik yaitu PDIP dan Gerindra, tapi KPUD Kabupaten Blitar mencoret partai Gerindra sebagai koalisi pengusung incumbent tersebut karena gagal menunjukkan surat kesepakatan koalisi antar partai politik.

Alasan KPUD Kabupaten Blitar melakukan pencoretan tersebut karena Partai Gerindra hanya menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) tanpa menyertakan surat kesepakatan

---

Deadlocknya pemilukada ditiga daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten tasikmalaya dan Kabupaten Timur tengah karena aturan dalam Undang-Undang no 8 tahun 2015 yang mengharuskan adanya lebih dari 1 calon sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 uji materil calon tunggal dalam Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

emilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar, <http://kpu.blitarkab.go.id/?p=546>,  
December 2018 pukul 18.57 wita



koalisi antar-partai politik<sup>11</sup>, Dicoiretnya partai Gerindra sebagai partai koalisi pengusung pasangan calon tunggal di Kabupaten Blitar tidak mempengaruhi pencalonan pasangan incumbent Rijanto-Urip Widodo (RIDHO) sehingga secara *de jure*, PDIP menjadi satu-satunya partai politik pengusung pasangan RIDHO. Alasan terbesar mengapa Kabupaten Blitar hanya mampu menghasilkan satu pasang calon adalah karena keengganan partai politik lain untuk mengusung calonnya. Koalisi besar yang dipimpin oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sengaja melakukan manuver boikot Pilkada dengan cara tidak mendaftarkan jagoannya. Selain itu, calon independen juga tidak muncul dalam kontes pesta demokrasi di Kabupaten yang terkenal dengan icon candi Penataran ini.<sup>12</sup>

Hampir sama yang terjadi dalam pemilukada Tasikmalaya yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Dipemilukada ini hanya terdapat satu pasang kandidat yang bertarung pada pemilukada Tasikmalaya 2015, yaitu Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yang diusung oleh PDIP, PAN, dan PKS<sup>13</sup>. Meskipun KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran kembali karena hanya satu pasangan calon Pemilukada sedangkan syaratnya harus dua. Pendaftaran dibuka pada 1 - 3 Agustus

---

<sup>11</sup>Solichan Arif, "KPU Blitar Bubarkan Koalisi Pungusung Calon  
lam<http://news.okezone.com/read/2015/10/15/519/1232582/kpu-blitar-bubarkan-usungcalon-tunggal>, diunduh pada 17 December 2018  
s melalui <https://media.neliti.com/media/publications/95684-ID-calon-tunggal-dalam-umum-kepal.pdf> pada tanggal December 17, 2018 pukul 01:28 Wita  
es melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Bupati\\_Tasikmalaya\\_2015](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Tasikmalaya_2015)  
al 17 December 2018 pukul 19:39 Wita



2015, namun karena masih tidak ada yang mendaftar maka dibuka kembali pada 9 -11 Agustus 2015.<sup>14</sup>

Dalam pemilukada Timor Tengah terdapat sembilan partai yang tidak ikut serta dalam pemilukada ini meskipun mereka mempunyai hak untuk mengajukan calon-calon terbaik mereka untuk maju dalam pemilukada namun hal ini tak kunjung di lakukan oleh partai-partai tersebut, pasangan MB-Asman Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes menjadi satu-satunya pasangan yang maju dalam pemilukada serentak tahun 2015 pasangan ini hanya didukung oleh partai PDIP yang memiliki delapan kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah.<sup>15</sup>

Setelah pemilukada serentak tahun 2015 dianggap berhasil pemilukada serentak kembali dilakukan pada Febbuari tahun 2017 yang diikuti 7 provinsi, 18 kota, dan 76 Kabupaten diseluruh Indonesia namun lagi-lagi polemik calon tunggal dalam pemilukada kembali terjadi di tahun ini ada 9 daerah yang hanya memiliki satu pasang calon yang maju dalam pemilukada tahun 2017. Berbeda pada tahun 2015 dimana partai yang tidak mengusung calonnya meskipun mempunyai hak untuk mengusung calon, namun ditahun 2017 partai-partai membuat koalisi besar yang hanya mendukung satu calon, dalam setiap calon masing-masing memiliki 7-10 partai pengusung.



melalui <http://repository.ut.ac.id/6719/2/megafury02.pdf> pada 17 December 2018  
7 Wita.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Bupati\\_Timor\\_Tengah\\_Utara\\_2015](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Timor_Tengah_Utara_2015)  
cember 2018 pukul 13:20 Wita

Table 2 Daftar Calon Tunggal Tahun 2017

NO	TAHUN	NAMA DAERAH/NAMA PASANG CALON DAN PARTAI PENGUSUNG
1	2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Tebing Tinggi (sumatera Utara) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar</li> <li>• Diusung oleh NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, dan PPP.</li> </ul> </li> <li>2. Kabupaten Tulang Bawang Barat (lampung) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umar Ahmad dan Fauzi Hasan</li> <li>• Diusung oleh PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem.</li> </ul> </li> <li>3. Kabupaten Pati (Jawa Tengah) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haryanto dan Saiful Arifin</li> <li>• Diusung oleh PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP</li> </ul> </li> <li>4. Kabupaten Landak (Kalimantan Barat) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karolin dan Herculanus</li> <li>• Diusung PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN.</li> </ul> </li> <li>5. Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry</li> <li>• Diusung oleh PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB</li> </ul> </li> <li>6. Kabupaten Maluku Tengah (Maluku) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury</li> <li>• Diusung oleh Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, dan PDIP.</li> </ul> </li> <li>7. Kota Jayapura (Papua) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rustan Saru dan Benhur Tomi Mano</li> <li>• Diusung oleh PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra.</li> </ul> </li> <li>8. Kota Tambora (Papua Barat) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabriel Asem dan Mesak Metusala</li> <li>• Diusung oleh NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura.</li> </ul> </li> <li>9. Kota Sorong (Papua Barat) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar</li> <li>• Diusung Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB.</li> </ul> </li> </ol>

Pada tahun 2018 pemilukada serentak kembali di lakukan

ada serentak ini merupakan pemilukada serentak yang ke tiga

dan di ikuti 171 daerah ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115



Kabupaten ini diikuti oleh 520 pasang calon dari 171 daerah yang melakukan pemilukada, terdapat 16 daerah yang menyelenggarakan pemilukada dengan calon tunggal terkhusus untuk Sulawesi Selatan ada tiga daerah yang hanya mempunyai satu calon atau dengan kata lain melawan kotak kosong yaitu Kota Makassar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone<sup>16</sup>.

Table 3 Daftar Daerah calon Tunggal Tahun 2018

	NAMA DERAH, NAMA PASANGAN CALON DAN NAMA PARTAI PENGUSUNG
Tahun 2018	A. Sumatera Utara
	1. Kabupaten Deli Serdang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.Ashari Tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar</li> <li>• Diusung PAN. PKB. DEMOKRAT. PKPI. PKS. PPP. HANURA. PDIP. NASDEM. GERINDRA. GOLKARL</li> </ul>
	2. Kabupaten Lawas Utara
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap</li> <li>• Diusung PAN. PKB. DEMOKRAT. PKPI. PBB. PPP. HANURA. PDIP. NASDEM. GERINDRA. GOLKAR</li> </ul>
	B. Sumatera Selatan
	3. Kabupaten Prabumulih
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri.</li> <li>• Diusung NASDEM. PAN. GERINDRA. PKS. DEMOKRAT. PKB. PKPI. PBB. GOLKAR. PDIP</li> </ul>
	C. Banten
	4. Kabupaten Lebak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hj. Iti Octavia Jayabaya dan H. Ade</li> <li>• Diusung DEMOKRAT, NASDEM, PKB, PKS, PDIP, GOLKAR, PAN, PPP, HANURA, DAN GERINDRA</li> </ul>	
5. Kabupaten Tangerang	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Arief R Wisnansyah dan H. Syahrudin</li> <li>• Diusung DEMOKRAT, PPP, PKS, PAN, GOLKAR, PDIP, NASDEM, PKB, HANURA, DAN GERINDRA.</li> </ul>	
6. Kabupaten Tangerang	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahmed Zaki Iskandar dan H. Mad Romli, SH.,MM</li> <li>• Diusung DEMOKRAT. NASDEM. PKB. PKS. PDIP. GOLKAR. PAN. PPP. HANURA. PBB. PKP. GERINDRA</li> </ul>	



es melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42647891> pada tanggal 19 2018 pukul 21;59 Wita

Table 3 Daftar Calon Tunggal Pada Pemilukada Tahun 2018

	NAMA DERAH, NAMA PASANGAN CALON DAN NAMA PARTAI PENGUSUNG
Tahun 2018	<p>D. Jawa Timur</p> <p>7. Kabupaten Pasuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gus Irsyad-Gus Mujib</li> <li>• Diusung PKB. PDIP. GERINDRA. DEMOKRAT. PAN. GOLKAR. PPP. PKS. HANURA</li> </ul> <p>E. Kalimantan Selatan</p> <p>8. Kabupaten Tapin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HM Arifin Arpan-Syafrudin Noor dan Syafrudin Noor</li> <li>• Diusung GOLKAR. PKB. PDIP. DEMOKRAT. GERINDRA. PPP. PKS. PAN</li> </ul> <p>F. Sulawesi Selatan</p> <p>9. Kota Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi</li> <li>• Diusung Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP. PKS</li> </ul> <p>10. Kabupaten Enrekang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muslimin Bando-Asman</li> <li>• Diusung GOLKAR. PAN. GERINDRA. PDIP. NASDEM. DEMOKRAT. HANURA</li> </ul> <p>11. Kabupaten Bone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H Andi Fahsar M Padjalangi dan H Ambo Dalle</li> <li>• Diusung GOLKAR. PAN. GERINDRA. NASDEM. DEMOKRAT. PDIP. PKS. PPP. HANURA. PBB. PKB</li> </ul> <p>G. Sulawesi Barat</p> <p>12. Kabupaten Mamasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramlan Badawi–Martinus Tiranda</li> <li>• Diusung GOLKAR. PKB. PKPI. PDIP. NASDEM. DEMOKRAT. PPP. PBB. PAN. PKS</li> </ul> <p>H. Sulawesi Utara</p> <p>13. Kabupaten Minahasa Tenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• James Sumendap dan dan Jesaya Joke Legi</li> <li>• Diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP</li> </ul> <p>I. Papua</p> <p>14. Kabupaten Puncak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Willem Wandik dan Alus Murib</li> </ul> <p>15. Kabupaten Jawajjiya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi</li> <li>• Diusung PDIP. DEMOKRAT. GERINDRA. PKB. HANURA. PAN. PKS. PKPI. PBB, NASDEM</li> </ul> <p>16. Kabupaten Mambero Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak</li> <li>• Diusung DEMOKRAT, PKS, PDI PERJUANGAN, GERINDRA, PAN, PBB DAN PKPI</li> </ul>



Dikota Makassar awalnya diikuti oleh dua paslon namun di diskualifikasinya pasangan calon MB-Asman yaitu Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari oleh Mahkamah Agung karena adanya pelanggaran terstruktur yang melibatkan aparatur pemerintah sehingga KPU mendiskualifikasi pasang Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari yang mengakibatkan hanya pasangan Munarfi Arifuddin-Rahmatika Dewi sebagai calon tunggal dalam pemilukada Kota Makassar<sup>17</sup>, sedangkan di Kabupaten Bone tidak adanya calon lain yang maju dan bersaing dalam pemilukada Bone menyebabkan pasangan A Fahsar M Padjalangi - Ambo Dalle (Tafaddal) jilid dua menjadi satu-satunya paslon yang maju dalam pemilukada Kabupaten Bone serta hampir seluruh partai politik menjadi partai pengusung paslon A Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle<sup>18</sup>.

Di Kabupaten Enrekang fenomena calon tunggal merupakan hal yang baru di mana hanya ada satu pasang calon yaitu Muslin Bando-Asman yang maju dalam pemiluka tahun ini Muslimin Bando sebagai bakal calon Bupati diusung oleh hampir semua partai politik. Adapun partai politik yang mengusung paslon tunggal MB-Asman di Kabupaten Enrekang adalah Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan PDIP. Dengan total 26 Kursi dari 30 kursi di DPRD Enrekang. Golkar

---

<sup>17</sup> Di akses melalui Artikel yang telah tayang di [tribun-timur.com](http://tribun-timur.com) dengan judul Pilwali Makassar - Menggugat, Pj Gubernur Sulsel Harap Seluruh Pihak Terima Putusan MK, [makassar.tribunnews.com/2018/07/18/pilwali-makassar-appi-cicu-menggugat-pj-sulsel-harap-seluruh-pihak-terima-putusan-mk](http://makassar.tribunnews.com/2018/07/18/pilwali-makassar-appi-cicu-menggugat-pj-sulsel-harap-seluruh-pihak-terima-putusan-mk). Pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul

es melalu <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/08/borong-11-parpol-tafaddal-di-kpu-bone> pada tanggal 31 oktober 2018 pukul 11;59 wita



7 kursi, PAN 7 kursi, Gerindra 3 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, dan PKS 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, Sedangkan PBB 1 kursi, dan PDIP 1. Hanya PBB saja yang tidak tergabung dalam koalisi pengusung paslon Muslimin Bando-Asman, sedangkan PKS yang bergabung dalam koalisi Muslimin Bando-Asman diakhir masa pendaftaran hanya menjadi partai pendukung.

Pada pemilukada sebelumnya yaitu pemilukada tahun 2008 dimana Muslimin Bando juga ikut serta dalam pemilukada ini berpasangan dengan Mustafa Tjawidu yang diusung oleh partai PAN. Namun pada pemilukada ini La Tinro La Tunrung yang berpasangan dengan Nur Hasan menjadi calon terpilih setelah mendapat dukungan terbanyak dari rakyat. Pada pemilukada selanjutnya pada tahun 2013 ada empat pasang calon yang maju dalam pemilukada ini dan pasangan Muslimin Bando-Amiruddin mendapat dukungan terbanyak dari rakyat yaitu 62,096 (55,72%)<sup>19</sup> mengalahkan tiga pesaingnya pada saat itu, hal yang perlu menjadi catatan penulis adalah setiap pemilukada dari tahun 2008, 2013 dan 2018 partai pengusung untuk Muslimin Bando selalu meningkat.

---

La Tinro La Tunrung dan Nur Hasan di usung oleh partai GOLKRA, PPP, PKS dan PDK  
Umar Leha dan Amir Palamsya di usung oleh partai PDIP, PPNUI dan PBB  
Muslimin Bando dan Mustapa di usung oleh PAN

<sup>19</sup> Di akses melalui <http://makassar.tribunnews.com/2013/09/05/kpu-menetapkan-muslimin-bando-menang-di-pilkada-enrekang-pada-18-December-2018-pukul-19:22-Wita>

Amir dan Mahmud kammane melalui jalur independen (5.321) 4,77%  
d Ridwan dan Muzakkir di usung oleh PPP, PPDI, PPI, Partai patriot (7.554) 6,78%  
Bando dan Amiruddin di usung oleh PAN, DEMOKRAT, GOLKAR, HANURA, PDIP (62.096)  
n dan Kasmin Karumpa di usung oleh PKS, GERINDRA, PBB (36.470) 24,01%



Pada awal sebelum pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ada beberapa calon yang dianggap dapat bersaing melawan Muslimin Bando dalam pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018, yaitu bapak Amiruddin yang merupakan wakil bupati Muslimin Bando pada periode sebelumnya, dan merupakan salah satu kandidat terkuat yang di gadang-gadang untuk maju bersaing melawan Muslimin bando-Asman dalam pemilukada bupati Kabupaten Enrekang tahun 2018, namun iya pun tidak dapat berbuat banyak ketika partai (Nasdem) yang awalnya mendukung Amiruddin untuk maju bersaing dalam pemilukada Kabupaten Enrekang itu berpindah mendukung Muslimin bando.

Bakal calon lain yang batal maju dalam pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018 adalah Maman Nurdin Karumpa (atong) seorang pengusaha sukses dari Papua. Putra daerah asli yang kembali dari perantauan untuk bersaing dalam pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018, namun putra daerah ini tidak dapat berbuat banyak untuk maju dalam pemilukada Kabupaten Enrekang hingga batas pendaftaran calon bupati Enrekang berakhir. Hal itu juga terjadi pada bakal calon lain yang awalnya di anggap bakal maju sebagai calon bupati Kabupaten Enrekang periode 2018-2023 yaitu Saleh Rahim dan Roem Latunrung.

Awalnya Saleh Rahim dan Roem Latunrung telah menyatakan akan maju pada pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018 diacara mi yang diadakan oleh mantan bupati Kabupaten Enrekang dua yaitu H. La tinro La tunrung, namun dua tokoh ini pun tak dapat



merealisasikan pernyataannya itu hingga batas pendaftaran bakal calon bupati Kabupaten Enrekang berakhir.<sup>20</sup>

Setelah memasuki masa tahapan pelaksanaan kampanye, masyarakat Kabupaten Enrekang membentuk perlawanan terhadap paslon tunggal dengan membentuk tim relawan laskar kotak kosong. Laskar kotak kosong melakukan kampanye dengan membuat pertemuan-pertemuan, memasang spanduk, posko, dan sosialisasi ke masyarakat. Perlawanan kotak kosong begitu terasa di Enrekang. Pertemuan relawan kotak kosong juga mencapai ribuan orang, bahkan tokoh sekaliber Prof. Yusril Ihza Mahendra, sengaja datang ke Enrekang untuk mendukung laskar kotak kosong.<sup>21</sup>

Bagi Yusril, yang notabene adalah ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB), perjuangan membela kotak kosong merupakan hak dari setiap warga negara. Uniknya, PBB meletakkan Enrekang sebagai daerah prioritas pembelaan terhadap kolom kosong. Seperti kita tahu, bahwa hanya PBB yang tidak mengusung pasangan calon tunggal dipemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018. Selebihnya, delapan partai pemilik kursi di DPRD Kabupaten Enrekang, mengusung dan mendukung Muslimin Bando (MB)-Asman menjadi paslon tunggal. Inilah yang menjadi hal yang

---

Dari total 115.450 wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya, MB-Asman berhasil meraih perolehan 67,15 % atau 77.586 suara. Sementara kolom kosong memperoleh suara sebanyak atau 35.826 suara.

melalui <http://upeks.fajar.co.id/2016/11/01/la-tinro-silaturahmi-empat-balon-bupati/> al 20 september 14:00 Wita

melalui <http://makassar.tribunnews.com/yusril-ihza-mahendra-jauh-jauh-keenrekang-kotak-kosong> Pada tanggal 25 januari 2019 pukul 18:07 Wita



menarik untuk diteliti karena perlawanan kotak kosong pada pemilukada kabupaten Enrekang begitu terasa seakan tak tinggal diam dengan kampanye yang dilakukan oleh calon dan hal ini lah yang membedakan dengan perlawanan kotak kosong di daerah-daerah lain yang memiliki satu calon atau calon tunggal.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai penyebab terjadinya calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Calon Tunggal Pada Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018”** mengingat hal ini merupakan fenomena baru yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa fenomena calon tunggal dipemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018 dapat terjadi?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal penyebab “terjadinya calon tunggal dalam pemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018” secara akademis dan dapat di pertanggung jawabkan.



#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia akademisi khususnya Program Studi Ilmu Politik mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya calon tunggal pada setiap pemilukada.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi atau penelitian terdahulu bagi penelitian selanjutnya ataupun informasi bagi para seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan untuk masyarakat Enrekang pada khususnya tentang hal apa yang menyebabkan sehingga fenomena calon tunggal dapat terjadi dipemilukada Kabupaten Enrekang tahun 2018.



## E. Telaah pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menganggap pentingnya melakukan tinjauan tentang penelitian sebelumnya yang dianggap mempunyai tema yang sama agar terhindar dari kesamaan penelitian sebelumnya.

Nur Rukiyanto dalam skripsinya dinamika pemilihan kepala daerah calon tunggal pasca putusan mahkama konstitusi no 100/PPU-XIII/2015 (studi kasus di Kabupaten Blitar tahun 2015)<sup>22</sup>. Skripsi ini membahas tentang keputusan mahkama konstitusi no 100/PPU-XIII/2015 mengenai calon tunggal dalam pemilukada, melihat sebelumnya dalam Undang-Undang no 8 tahun 2015 tentang pemilukada mewajibkan adanya minimal dua pasang calon dalam pemilukada, nyatanya menimbulkan *deadlock* dipertengahan karena banyaknya daerah yang terancam batal melakukan pemilukada, akibat hanya ada satu pasangan calon dalam pemilukada tidak terkecuali di Blitar.

Maka Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pengujian uji materi undang-undang no 8 tahun 2015 terkait pasal 49 ayat (8), (9) pasal 50 ayat (8), (9) pasal 51 ayat (2) pasal 52 ayat (2) dan pasal 54 ayat (4), (5), (6) UU Pemilukada.

Penelitian ke dua di lakukan oleh Rizky Ananda Sari Perngin Angin

judul Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di

\_\_\_\_\_  
yanto skripsinya dengan judul dinamika pemilihan kepala daerah calon tunggal pasca mahkama konstitusi no 100/PPU-XIII/2015 (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017)



Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017). Fenomena calon tunggal dalam pilkada melawan kotak kosong pada demokrasi, proses perekrutan, proses pemilihan, serta dampak calon tunggal melawan kotak kosong pada partisipasi pemilu masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan upaya perekrutan calon kepala daerah oleh KPU Kota Tebing Tinggi dikarenakan hanya satu bakal Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kota Tebing Tinggi memperpanjang masa pendaftaran. Hingga batas akhir waktu masa perpanjangan, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar. Dan pada akhirnya KPU Kota Tebing Tinggi menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 hanya ada satu Pasangan Calon. serta langkah yang dilakukan KPU Tebing Tinggi untuk mengantisipasi hal ini terulang kembali pada Pilkada selanjutnya dan dampak dari calon tunggal pada Pilkada Kota Tebing Tinggi 2017<sup>23</sup>.

Penulis mencoba memposisikan diri agar terhindar dari kesamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dimana dua sebelumnya penelitian pertama oleh Nur Rukiyanto membahas tentang apakah pilkada dengan pasangan tunggal telah sesuai dengan norma dan aturan yang

terlaku sesuai dengan keputusan MK no 100/PPU-XIII/2015

Handa Sari Perngin Angin skripsinya dengan judul Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017) (universitas Sumatera Utara)



mengenai calon tunggal dalam pilukada. Penelitian ke dua oleh Rezky ananda sari perngin angin yang mencoba meneliti upaya dan proses perekrutan calon kepala daerah oleh KPU khususnya KPU Kota Bukit tinggi sehingga fenomena calon tunggal dapat terjadi dan apa dampak calon tunggal terhadap masyarakat Bukit Tinggi. Sedangkan penulis sendiri mencoba meneliti sebab-sebab terjadinya calon tunggal secara umum dan tidak hanya merujuk kepada satu instansi saja dalam pilukada terkhusus calon tunggal yang berada di Kabupaten Enrekang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan konsep yang dianggap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis memulainya dengan membahas pendekatan *new institutionalism* (institutiolisme baru), serta tinjauan tentang pemelukada langsung dan tinjauan tentang kepartaian.

#### A. *New institutionalism* (institutiolisme baru)

Pendekatan *new institutionalism* (institutiolisme baru) merupakan pendekatan yang berkembang pada pertengahan 1980-an pendekatan ini merupakan pendekatan yang lahir karena adanya pergeseran paradigma dari teori-teori *society-centered* ke teori-teori *state-centered* dan kecendrungan ini membuka jalan untuk timbulnya pendekatan *new institutionalism*. Pendekatan institutiolisme baru merupakan pendekatan yang meliputi beberapa pendekatan lain bahkan beberapa bidang disiplin ilmu pengetahuan yang lain seperti sosiologi dan ekonomi, institutiolisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi sebut saja misalnya institutiolisme baru sosiologi, institutiolisme baru ekonomi dan sebagainya<sup>24</sup>.

Institutiolisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan *behavioralis* yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku

ak besar atau massa dan pemerintah sebagai institusi yang hanya

---

Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.



mencerminkan kegiatan massa itu. Institusionalisme baru merupakan penentang utama teori strukturalis yang cenderung mengabaikan faktor elit politik atau kepemimpinan individu dalam menentukan perubahan politik dan terlalu menekankan kepada determinasi aspek struktural<sup>25</sup>. Institusionalisme baru tidak saja mengklaim bahwa individu dan segala kepentingannya adalah determinasi utama setiap proses politik, tetapi juga menyatakan keberlangsungannya seluruh tatanan struktural, baik kelembagaan maupun prosedural sangat tergantung kepada sejauh mana tatanan tersebut memasukan kepentingan-kepentingan individu<sup>26</sup>.

Inti dari pendekatan institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut<sup>27</sup>: Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang di batasi secara kolektif. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus menerus. Sekalipun demikian pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek masing-masing. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai



---

dyuyandi, S.ip, M.si, pengantar ilmu politik Depok: PT rajagrafindo persada. hal 40

1

Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.

akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Gagasan institusiolisme baru oleh beberapa pakar politik dianggap sesuai untuk memahami proses perubahan politik yang terjadi di negara-negara demokrasi baru karena dua alasan. *Pertama*, karena masih lemahnya tatanan prosedural dan kelembagaan. *Kedua*, kuatnya pengaruh para pimpinan politik baik formal maupun nonformal yang masih lebih menentukan daripada aturan formal dalam kebanyakan proses politik, secara kultural kebanyakan negara demokrasi baru adalah negara dengan tradisi paternalistik yang sangat kuat<sup>28</sup>

Sedangkan fokus perhatian dari Institutionalisme baru dibedakan dalam beberapa pendekatan turunan yakni *Rational Choice Institutionalism*, *Sociological Institutionalisme*, dan *Historical Institutionalism*<sup>29</sup>. *Pertama Rational Choice* Institutionalism menurut Hall dan Taylor merupakan aliran pendekatan institusionalisme baru yang sangat kentara dipengaruhi oleh tradisi *behavioralis* yang menganggap bahwa interaksi manusia merupakan manifestasi dari kepentingan diri individu<sup>30</sup>. Menganggap bahwa aktor, baik individu maupun organisasi



dyuyandi, S.ip, M,si pengantar ilmu politik Depok: PT rajagrafindo persada. hal 41  
l, John L, 2004, Institutional Change and Globalization, Princeton University Press,  
, & Taylor, R. (1996). Political Science and the Three Institutionalism. Political Studies,

selalu memiliki seperangkat preferensi atau selera yang baku. Untuk mencapai preferensi-preferensi tersebut, aktor akan bertindak dan berperilaku secara instrumental, bertindak strategis dan membuat kalkulasi yang komprehensif untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. *Rational Choise* memiliki fokus utama pada persoalan bagaimana aktor-aktor yang ada membangun dan merubah institusi untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Institusi juga dianggap hadir untuk menata interaksi-interaksi aktor dengan cara mempengaruhi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Selain itu institusi juga diharapkan bisa melanjutkan agenda dan preferensi individu dan organisasi.

*Kedua, Sociological Institutionalism* Menurut Campbel merupakan institutionalism yang berfokus pada upaya institusi untuk mampu menyediakan identitas dan makna interaksi sosial. Selain itu juga concern pada bagaimana institusi mempengaruhi pilihan dan identitas aktor<sup>31</sup>. cara pandang ini melihat bahwa lingkungan (nilai dan identitas) akan mempengaruhi pilihan dan strategi aktor politik dalam institusi. Perubahan dan pembentukan institusi harus mempertimbangkan faktor eksternal institusi.

*Ketiga, institusionalisme historis* (historical institutionalism). Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu tatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis



---

l, John L, 2004, Institutional Change and Globalization, Princeton University Press, Hal 17

sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya. Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik<sup>32</sup>.

Penulis mencoba menyimpulkan bahwa pendekatan instituolisme baru sebagai suatu pendekatan yang luas, dimana pendekatan ini tidak hanya membahas tentang aturan dalam institusi yang mempengaruhi individu tapi individu juga dapat mempengaruhi institusi itu sendiri, seperti yang di jelaskan diatas bahwa adanya kepentingan-kepentingan individu (aktor) yang masih di anggap kuat sehingga dapat mempengaruhi institusi itu sendiri. Pendekatan ini di rasa cocok untuk penelitian ini karena dari pendekatan ini kita tidak hanya membahas tentang institusi itu sendiri tapi bagaimana institusi itu sendiri bisa saja dipengeruhi oleh aktor, dengan kata lain mungkin saja dalam pemilukada ini adanya kekuatan aktor atau elit yang dapat memengaruhi institusi sehingga fenomena calon tunggal dapat terjadi.

## **B. Tinjauan pemilukada langsung di Indonesia**

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi

memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam



---

2011, Media Massa dan Institusi Politik, dalam <http://lutviah.net/category/teori-dan-komunikasi/>, diakses tanggal 22 september 2018 jam 00;18 wita

mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya<sup>33</sup>.

Demokratisasi ditingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. *Kedua*, pemilukda langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak.

*Ketiga*, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi ditingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat<sup>34</sup>.



---

aturohman. 2005. "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung", Jurnal Legality, Vol 12, Nomor 1  
li. 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pajajar. Hal. 333

Dalam dunia politik, pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Dan penyelenggaraan pemilukada dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Secara universal pemilukada dipahami sebagai lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative goverment*) yang menurut Robert Dahl, merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahn demokrasi di zaman moderen<sup>35</sup>.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah sebuah mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dan penyelenggaraan Pemilihan Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

aan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan

---

Habodding & Arjul Muh pengantar ilmu politik, UB pers Malang 2016 hal 146



keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur/wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa adanya intervensi (otonom)<sup>36</sup>. Untuk itulah, pelaksanaan pemilukada langsung dianggap sebagai sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya.

Dipilihnya sistem pemilukada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri dikalangan masyarakat. Pemilukada dinilai optimisme sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga kehidupan demokrasi di tingkat lokal dapat berkembang. Sementara pesimisme masyarakat terhadap sistem pemilukada langsung dinilai dapat memberi peluang besar bagi pemimpin daerah atas berkembangnya gejala KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan



---

ihatmok, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan  
a. 2005. Semarang: Pustaka Belajar. Hal. 98

daerah, serta tumbuhnya “*money politic*” dikalangan pejabat daerah yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Namun terlepas dari hal tersebut penulis menganggap, keberhasilan pemilukada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisme dan rasionalisme rakyat itu sendiri, pada titik itulah pesimisme terhadap pemilukada langsung menemukan relevansinya. Tentu saja, dengan adanya perubahan dalam pemilihan umum kepala daerah ini maka telah menunjukkan bahwa ada kedewasaan demokrasi pada masyarakat Indonesia itu sendiri meskipun dalam hal ini pemilukada yang berlangsung hanya mempunyai satu calon atau lebih, namun kembali lagi bahwa keberhasilan suatu pemilukada sangat ditentukan kesadaran masyarakat itu sendiri.

### C. Tinjauan Partai Politik

Partai politik awalnya muncul pada negara satu dengan yang lain tidaklah sama, hal itu karena adanya perbedaan latar belakang sejarah sebuah negara. Akan tetapi secara mendunia partai politik diyakini muncul pertama kali di Eropa Barat pada akhir abad ke-18. Munculnya partai politik pada saat itu lebih karena semakin meluasnya kegiatan-kegiatan politik dan hak pilih dikalangan masyarakat, sehingga di perlukan partai



sebagai sebuah organisasi yang mampu menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah<sup>37</sup>.

Jika pada awalnya partai politik bentuk secara terbatas yaitu oleh kalangan politik didalam parlemen, maka dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat muncul partai politik yang lahir di luar parlemen, partai-partai ini umumnya didirikan dengan prinsip atau dasar idiologi kuat, seperti halnya di Amerika Serikat terdapat banyak partai diluar parlemen yang memiliki basis idiologi tertentu seperti partai beridiologikan sosialisme, fasisme, komunisme, dan lain sebagainya<sup>38</sup>.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah-wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama<sup>39</sup>.

Carl j. friedrich menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan ke pada anggota



dyuyandi, S.ip, M,si pengantar ilmu politik Depok: PT rajagrafindo persada. hal 150

Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.

partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materil<sup>40</sup>. Soltau memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat<sup>41</sup>.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli tersebut, penulis berusaha mendeskripsikan bahwasanya meskipun tidak ada keseragaman dalam hal defenisi mengenai partai politik, secara prinsipil sebenarnya terdapat kesamaan dalam hal karakteristik dan tujuan umum, yakni dalam setiap defenisi tentang partai politik akan serta merta ditemukan identitas partai politik sebagai sebuah organisasi (institusi) yang menjadi dasar ruang lingkup aktivitasnya dan kekuasaan (jabatan politik atau jabatan publik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik di mana pun ketika melakukan aktivitasnya.

Hal lain yang perlu menjadi rujukan konseptual pada penelitian ini terkait dengan partai politik adalah fungsi partai politik itu sendiri, dimana setiap negara demokratis senantiasa akan melibatkan warga negaranya dalam proses politik yang berlangsung, baik demi kepentingan kemanusiaan maupun demi untuk menjamin pengaruh dan partisipasi yang sama dalam proses politik. Salah satu wadah yang bisa menjamin



---

04  
surabakti, 1992. Memahami ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah partai politik. Secara sederhana partai politik memiliki fungsi yaitu Menjalankan seluruh input yang ada dalam system politik, yakni:

*Pertama* sosialisasi politik fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.<sup>42</sup>

*Kedua* partai politik berfungsi sebagai sarana pengendalian konflik. Dalam literatur partai politik terlibat bahwa kemunculan partai disatu masyarakat tidak lepas dari dua hal, yakni dianutnya prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis, serta terjadi modernisasi. Modernisasi mendorong berkembangnya aspirasi dalam satu masyarakat, yang pada gilirannya selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya pragmentasi sosial yang semakin luas, yang pada gilirannya membutuhkan partai politik.<sup>43</sup>

*Ketiga*, membentuk pemerintahan. Beberapa pakar bahkan menyebut kemampuan membentuk pemerintahan sebagai fungsi yang

enting. Alasannya karena partai politik merupakan produk dari

Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal.

408



gelombang demokrasi, maka satu pemerintahan yang demokratis sewajarnya merupakan hasil dari kompetisi antar partai yang ada. Hanya masalahnya, apakah kompetisi sebatas menentukan porsi komposisi wakil partai dalam pemerintahan? Jawabnya sangat tergantung kepada sistem kepartaian yang berlaku<sup>44</sup>

*Keempat*, fungsi rekrutmen merupakan fungsi yang berkaitan dengan tema penulis dimana Fungsi rekrutmen adalah fungsi yang paling mendasar dalam keikutsertaan pada setiap pemilu ataupun pemilukada fungsi rekrutmen ini menjadi hal yang mendasar karena dari fungsi rekrutmen ini partai politik bisa mengusung hasil kader yang dianggap mampu untuk maju bersaing dalam Pemilu ataupun Pemilukada. Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam *buku Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menyebutkan proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai<sup>45</sup>.

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai

untuk melindungi kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut



---

haboddin/Muh Arjul pengantar ilmu politik ; UB press jannuari 2016 hal 190-191  
Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal

serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh

Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan menghususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin<sup>46</sup>”.

Rush dan Althoff menjelaskan ada dua proses perekrutan kader *pertama* sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. *Kedua* sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.<sup>47</sup> Proses perekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar *patronase* (lindungan) dalam proses perekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam



---

surabakti, 1992. Memahami ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rush, Phillip Althoff, 2007, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini karta: PT Raja Grafindo Persada, Hal:247.

arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.

Rekrutmen Partai Politik juga di atur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik tahun 2018 pada Undang-Undang ini di atur berdasarkan kebutuhan partai politik selama ini.<sup>48</sup> Namun dalam rekrutmen bakal calon yang akan di usung dalam Pemilu ataupun Pemilukada mempunyai sistem yang berbeda mengingat peraturan yang mengharuskan setiap calon yang akan maju dalam Pemilu ataupun Pemilukada melalui jalur pengusungan parpol harus mempunyai parpol pengusung yang memenuhi syarat minimal jumlah kursi yang ada di DPRD/DPR, syarat tersebut terkadang membuat beberapa Partai Politik yang mempunyai jumlah kursi yang tidak mencapai minimal syarat jumlah kursi yang di tetapkan membuat koalisi untuk mengusung satu calon untuk maju dalam Pemilu atau Pemilukada sampai memenuhi syarat minimal jumlah kursi yang harus di penuhi.

Rahat dan Hamza menjelaskan ada dua model dalam mengambil keputusan dalam penetapan calon yang akan di usung dalam Pemilu ataupun Pemilukada, *pertama* model pemilihan: Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur

n tanpa seorang pun penyeleksi dapat mengubah daftar  
si. *Kedua* model penunjukan: Dalam model penunjukan,

Undang tentang partai politik tahun 2018



penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.<sup>49</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen partai politik merupakan ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik. Disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen bakal calon yang akan di usung mempunyai andil besar dalam pandangan masyarakat terhadap partai politik mengingat calon yang di usung merupakan cerminan partai pengusung itu sendiri.

#### D. Kerangka pikir

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang menggunakan pendekatan *new institutionalism* (instituilisme baru), dan tinjauan pemilukada langsung serta tinjauan tentang partai politik dalam menganalisis fenomena calon tunggal yang terjadi pada pilkada Kabupaten Enrekang tahun 2018.

Dimana kita tahu bahwa pendekatan instituilisme baru merupakan pendekatan yang tidak hanya melihat dari segi kelembagaan tetapi

dari berbagai aspek (*internal dan external*) penulis berasumsi

---

nungkas. 2011. Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia. Perum Griya Saka Permai. hal 99



bahwa adanya pengaruh dari luar dan dalam lembaga yang bisa saja menjadi penyebab terjadinya calon tunggal dalam pemilu. Dalam hal ini kelambagaan yang dimaksud adalah dari dalam instansi pemerintahan sendiri sedangkan pengaruh dari luar adalah masih berpengaruhnya aktor politik itu sendiri baik secara kapabilitas maupun Elektabilitas.

Perlunya tinjauan tentang partai politik dianggap penting hal ini disebabkan karena partai politik sebagai salah satu *stakeholder* yang terikat dalam pemilu, serta pentingnya mengetahui bagaimana cara perekrutan partai politik untuk dijadikan kader maupun aktor untuk diusung dalam Pemilu maka dari itu pentingnya tinjauan tentang partai politik untuk membantu penelitian ini. Adapun tinjauan pemilu langsung merupakan aspek penunjang dalam penelitian ini agar kita mengetahui apakah pemilu ini sudah berlangsung dengan norma dan aturan yang berlaku atau belum.



## E. Skema penelitian

Gambar 1 Skema penelitian

